

**ANALISIS PEMEKARAN DESA TERHADAP PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
(Studi Pada Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)**

Nur Lailatul Mubarakah

NIM. 11311788

Pemimbing I: Ardhana Januar M,M.KP, Pemimbing II : Drs. Sariyono, M.Pd

ABSTRAK

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemekaran desa berdampak positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur ini dapat dilihat dengan adanya perbaikan jalan, pembangunan talud jalan untuk memperlancar irigasi, serta pembangunan kantor Desa Ringinputih. Masyarakat desa ringinputih hendaknya menjaga bersama sarana dan prasarana yang telah ada, seperti talud yang telah dibangun sebaiknya diadakan kerja bakti rutin agar talud tetap dalam keadaan baik serta jalan yang sudah baik harus dijaga dan digunakan dengan semestinya.

Kata Kunci :Infrastruktur, Pembangunan, Pemekaran Desa,

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dampak lain adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu kebijakan - kebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih transparan. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada pasal 78 berisi tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tetapi dengan luasnya suatu desa tentu pembangunan suatu desa tidak merata. Ada beberapa desa yang dengan luasnya desa tersebut menginginkan pemekaran desa agar pembangunan desa merata dan efektif.

Keadaan Desa Ringinputih sebelum adanya pemekaran Desa merupakan salah satu bagian dari wilayah Desa Carangrejo yang memiliki luas wilayah 716 hektar terbagi dalam 9 Dukuh dengan penduduk yang mencapai 8,32 ribu jiwa. Keadaan sarana prasarana di Desa Ringinputih awalnya sangat kurang memadai. Berdasarkan kondisi prasarana jalan, dari seluruh jumlah total jalan 17.200 m yang ada di Desa Ringinputih 5.900 m berupa jalan aspal dengan kondisi sedang. Sedangkan sisanya sepanjang 11.300 m berupa jalan tanah dengan kondisi rusak. Selain itu permasalahan lain juga terjadi pada saat musim penghujan tiba yang mana pada saat ini jalan menuju pasar sering terjadi banjir, ini dikarenakan saluran pembuangan air kurang lancar sehingga perlu dibangun talud agar saluran air menjadi lebih lancar, karena saluran ini juga

menghubungkan menuju saluran irigasi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat prasarana jalan merupakan salah satu aspek utama untuk mempermudah transportasi untuk menghubungkan desa satu ke desa yang lain oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat sehingga proses pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakatpun dapat tercapai.

Keadaan Desa Ringinputih sebelum adanya pemekaran desa merupakan salah satu bagian dari wilayah Desa Carangrejo yang memiliki luas wilayah 716 hektar terbagi dalam 9 Dukuh dengan penduduk yang mencapai 8,32 ribu jiwa, dan mengingat luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Carangrejo dan adanya kebutuhan program pembangunan yang lebih intensif terhadap beberapa dukuh. Maka pemerintah Desa Carangrejo berupaya untuk menemukan solusi terbaik yaitu dengan cara melakukan pemekaran desa tersebut.

Keadaan sarana prasarana di Desa Ringinputih awalnya sangat kurang memadai. Berdasarkan kondisi prasarana jalan, dari seluruh jumlah total jalan 17.200 m yang ada di Desa Ringinputih 5.900 m berupa jalan aspal dengan kondisi sedang. Sedangkan sisanya sepanjang 11.300 m berupa jalan tanah dengan kondisi rusak. Selain itu permasalahan lain juga terjadi pada saat musim penghujan tiba yang mana pada saat ini jalan menuju pasar sering terjadi banjir, ini dikarenakan saluran pembuangan air kurang lancar sehingga perlu dibangun talud agar saluran air menjadi lebih lancar, karena saluran ini juga menghubungkan menuju saluran irigasi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat prasarana jalan merupakan salah satu aspek utama untuk mempermudah transportasi untuk menghubungkan desa satu ke desa yang lain

oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat sehingga proses pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakatpun dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul “**Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastuktur (Studi pada Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)** “

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009 : 197).

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan perangkat desa.pemerintahan desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” pemerintahan desa diartikan sebagai :“Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. (Widjaja, 2003: 3)

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan

pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut syarif, “pemekaran wilayah adalah tuntutan masyarakat untuk membentuk daerah yang baru, dengan cara memisahkan diri dari kesatuan wilayah pemerintahan daerah tertentu dengan tujuan untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik”. (Syarif, 2004 : 7).

T.R Batten (1979:52) berpendapat bahwa “pembangunan desa adalah suatu proses ketika anggota-anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka”.

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988:52) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.pendekatan ini di pilih berdasarkan dua alasan. Pertama, permasalahan tentang sejauhmana Pemekaran di Desa Ringin Putih terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan faktor

apasaja yang mempengaruhi pemekaran Desa Ringin Putih Terhadap Percepatan Pembangunan khususnya di bidang infrastruktur

ANALISA DATA

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari temuan suatu penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data di lapangan. Dari semua hasil temuan tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan, sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami. (Burhan, 2003:194).

Dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan dalam teknik analisis data Huberman dan Miles mengajukan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling menjalin padasaat, sebelum, selama dan sesudah pembentukan yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut (Huberman, 1992).

Langkah tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu untuk mencapai tingkat keakuratan hasil penelitian pada rumusan masalah yang di angkat dan dirumuskan tentang dampak pemekaran desa terhadap ketersediaan infrastuktur di Desa Ringin putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

HASIL PENELITIAN

Keadaan infrastruktur Desa Ringin putih setelah dimekarkan selama 3 tahun terakhir, rumah ibadah yang sbelumnya berjumlah 34 tempat ibadah setelah dimekarkan menjadi 38 tempat ibadah. Pembangunan tempat ibadah di desa

ringinputih ini bantuan dari pemerintah dan sumbangan dari swasta yang tenaganya murni dari swadaya masyarakat. Lapangan olahraga di desa ringinputih belum tersedia ini karena belum adanya tempat dan juga dari pemerintah desa masih memfokuskan pembanguana desa pada pembanguana kantor desa.

Rumah Kesehatan Masyarakat yang ada di desa ringinputih yang ada hanyalah berupa puskesmas yang mana dengan usaha perawatan sehingga kondisinya masih tetap layak untuk digunakan walaupun selalu dipergunakan. Dengan perawatan yang intensif maka kondisinya juga masih terawat.

Kondisi jalan aspal yang ada di desa ringinputih sebelum dimekarkan ada 7 km. setelah di mekarkan desa ringinputih menadapat dana APBD dari pemerintah sebesar 200.000.000 untuk mengaspal jalan desa. Dengan adanya dana dari pemerintah tersebut kondisi jalan aspal desa ringinputih yang awalnya hanya 7 km sekarang menjadi 9 km ini tentu memudahkan masyarakat untuk beraktifitas.

Kondisi jalan makadam di desa ringinputih sebelum dimekarkan ada 4 km dan jalan yang lain kondisinya masih jalan tanah berdebu yang tentu mempersulit masyarakat dalam beraktifitas. Setelah di mekarkan desa ringinputih mendapat dana dari pemerintah sebesar 100.000.000 untuk memakadam jalan.

Untuk saluran irigasi yang ada di desa ringinputih sebelumnya hanya ada 4,5 km dan setelah dimekarankan saluran irigasi yang berada di desa ringinputih menjadi 5,5 km. Sekolah yang ada di desa ringinputih selama 3 tahun terakhir tetap sama yakni 8 sekolah yang terdiri dari TK Dharma wanita, RA Carangrejo I,

RA Carangrejo II, SDN 2 Carangrejo, SDN 5 Carangrejo, Mi Muawanah, MTs AL-AZHAR, dan MA AL-AZHAR.

Sebelum dimekarkan bangunan desa ringinputih belum tersedia karena memang dulu desa ringinputih masi menjadi satu dengan desa carangrejo bangunan kantor desanya berada di desa carangrejo yang sampai sekarang menjadi kantor desa carangrejo. Setelah dimekarkan desa ringinputih mendapat dana APBD dari pemerintah sebesar 250.000.000 untuk pembangun kantor desa ringinputih. Sampai sekarang pembangunan kantor desa ringinputih telah mnecapai 70%..

KESIMPULAN

Berdasar penelitian dapat disimpulkan bahwa pemekaran Desa Ringinputih berdampak positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur hal ini dapat dibuktikan dengan perbaikan jalan di seluruh dusun yang ada di desa ringinputih yang dulunya jalan tanah dibangun menjadi jalan makadam dan dari jalan makadam menjadi jalan aspal, sehingga kawasan Desa Ringinputih kini sering dilewati pengguna jalan karena jalannya yang sudah baik. Pembangunan talud jalan untuk memperlancar irigasi,. Pembangunan kantor Desa Ringinputih lengkap dengan fasilitasnya diantaranya, kantor desa, calon balai desa, serta untuk lebih memudahkan dalam pelayanan juga pengadaan komputer lengkap dengan fasilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman.1987. *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*.Jakarta:
Media Sarana.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Daniel, 2009.*Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium
Pendidikan Kewaraganearaan.
- Grigg, Neil, 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley and
Son
- Kodoatie, Robert J.2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*.Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
- Lubis, Zulkarnain. 2012. *Pemekaran Untuk kesejahteraan*. Bandung:
- Michael P. Todaro. 1998. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan* Jilid I.
Jakarta: Erlangga
- Miles, Matthew B. 1992. Analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia
- Arikunto.Suharsimi 2005.*Manajemen Penelitian, edisi Revisi*.Jakarta : Rineka
Cipta
- Ridwan,2009, *Pemerintahan Daerah Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*.
Jakarta: Sinar grafika,
- Riawan, Tjandra. 2009. *Dinamika Peran Pemerintah Daerah Dalam Perspektif
Hukum Adminiistrasi*: Yogyakarta: Universitas Atmaja
- Soelistyo-Basuki. 1995. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Universitas
Terbuka

Sapi'i, Imam. . 2003. *“Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.* Jember :Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Zakarudin, Anjar. 2013. *“Dampak Pemekaran dalam Ketersediaan Sarana Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna.* Makasar :Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin Makasar